

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Ekonomi Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

5.1.1 Berdasarkan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Tingkat PDRB per kapita sangat berkaitan dengan mata pencaharian atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 5.1 PDRB Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Tahun 2023 (Miliar Rupiah)

No	Jenis Pekerjaan	Sumatera	Jawa
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	100904.7	139958.0
B	Pertambangan dan penggalian	53124.6	31196.0
C	Industri pengolahan	89646.5	1845.1
D	Pengadaan listrik dan gas	783.7	6259.8
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	335.8	46059.0
F	Konstruksi	50497.4	137454.4
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	45752.4	315342.5
H	Transportasi dan pergudangan	18986.5	99395.7
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6901.2	84872.6
J	Informasi dan komunikasi	12185.9	114122.7
K	Jasa keuangan dan asuransi	9533.0	102586.8
L	Real estate	11705.0	62431.5
M,N	Jasa perusahaan	2218.5	59344.0
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	14508.9	54050.6
P	Jasa Pendidikan	9085.8	70242.8
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	4234.9	25145.8
R,S,T,U	Jasa lainnya	3525.3	49188.7

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5.1, PDRB sektor perekonomian menurut lapangan usaha di Indonesia terbagi menjadi 17 sektor, dimana terdapat kontribusi masing-masing sub sektor. Berdasarkan data dari BPS di Pulau Sumatera pada tahun 2023, struktur perekonomian Pulau Sumatera didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pulau Sumatera pada tahun 2023 disumbang oleh kategori sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang sebesar 100904.7 (Miliar Rupiah). Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pulau Sumatera pada tahun 2023 tercatat meningkat. Peningkatan nilai PDRB tersebut dikarenakan Sumatera memiliki luas wilayah yang besar dan kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan pulau Jawa. Hal ini membuat lahan untuk pertanian, kehutanan dan perikanan masih tersedia cukup luas.

Berdasarkan data dari BPS Pulau Jawa pada tahun 2023, struktur perekonomian Jawa Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori, yaitu: Pertanian, kehutanan dan perikanan; Konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; Informasi dan komunikasi; dan Jasa keuangan dan asuransi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pulau Jawa pada tahun 2023 disumbang oleh kategori Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang sebesar 315.342,5 (Miliar Rupiah). Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pulau Jawa pada tahun 2023 tercatat meningkat. Peningkatan nilai PDRB tersebut disebabkan oleh meningkatnya penggerak utama konsumsi, penyerap tenaga kerja, dan pendukung sektor lainnya (tanpa dipengaruhi perubahan harga) di hampir semua kategori, seiring membaiknya situasi ekonomi.

5.1.2 Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian

Struktur mata pencaharian masyarakat menggambarkan sektor ekonomi utama yang menjadi sumber penghasilan mayoritas penduduk di suatu wilayah. Perbedaan geografis, demografis, dan tingkat pembangunan antarwilayah menyebabkan adanya variasi yang cukup signifikan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Tabel 5.2 Jenis Pekerjaan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa Tahun 2023 (Persen)

No	Jenis pekerjaan	Sumatera	Jawa
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	10.27	15.43
B	Pertambangan dan penggalian	0.45	0.38
C	Industri pengolahan	2.28	12.98
D	Pengadaan listrik dan gas	0.07	0.15
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.08	0.29
F	Konstruksi	1.53	5.34
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.79	14.90
H	Transportasi dan pergudangan	1.12	3.29
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.79	6.54
J	Informasi dan komunikasi	0.15	0.63
K	Jasa keuangan dan asuransi	0.21	1.00
L	Real estate	0.04	0.35
M,n	Jasa perusahaan	0.36	1.41
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1.17	1.65
P	Jasa Pendidikan	1.44	3.38
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0.44	1.05
R, s,t, u	Jasa lainnya	1.05	3.93

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5.2, Pekerjaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat di Pulau Sumatera adalah dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 10.27 persen. Banyaknya pekerjaan dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Pulau Sumatera dikarenakan Sumatera memiliki luas wilayah yang besar dan kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan Pulau Jawa.

Sedangkan di Pulau Jawa pekerjaan yang paling banyak diminati yaitu dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 15.43 persen, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14.90 persen dan Industri Pengolahan sebesar 12.98 persen.

Pulau Jawa memiliki jaringan irigasi yang cukup baik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini mendukung produktivitas pertanian, terutama sawah-sawah padi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selain itu, masyarakat Pulau Jawa tidak hanya bergantung pada sektor pertanian tetapi mengembangkan sektor industri pengolahan sebagai upaya diversifikasi ekonomi. Sebagian besar pusat ekonomi berada di Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Dikarenakan Pulau Jawa memiliki penduduk terpadat di Indonesia, Jawa menyediakan pasar lokal yang luas untuk produk-produk hasil industri pengolahan.

5.2 Hasil Uji Beda (Independent Sample t-test)

Analisis *Independent Samples T Test* dalam tujuan penelitian kedua bertujuan untuk menguji Perbedaan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hasil analisis *Independent Samples T Test* dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Hasil analisis *Independent Samples T Test*

Group Statistics					
	Pulau	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Koefisien Gini	Pulau Sumatera	50	.3172	.02399	.00339
	Pulau Jawa	30	.3890	.03133	.00572

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 5.3, diketahui bahwa jumlah observasi (N) pada wilayah Pulau Sumatera adalah sebanyak 50, sedangkan pada Pulau Jawa tercatat sebanyak 30 observasi. Rata-rata (mean) nilai yang diperoleh untuk Pulau Sumatera adalah sebesar 0,3172, sementara Pulau Jawa menunjukkan nilai mean yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,3890. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, nilai variabel yang diamati di Pulau Jawa cenderung lebih besar dibandingkan dengan di Pulau Sumatera.

Hasil analisis *Independent Samples T Test* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4 Hasil analisis *Independent Samples T Test*

t-test for Equality of Means				
		T	Df	Sig.(2-tailed)
Koefisien Gini	Equal variances assumed	-11.534	78	.000
	Equal variances not assumed	-10.795	493	.000

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan analisis *Independent Sample T Test* dapat diketahui bahwa nilai t hitung $(-11.534) < t$ tabel (-2.228) atau nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0.000 < 0.05$ pada taraf kepercayaan 95%, yang berarti ada perbedaan antara Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ketimpangan pendapatan disebabkan juga karena adanya perbedaan demografi yang cukup besar antar wilayah (Mustika, 2022).

5.3 Hasil Estimasi dan Uji Statistik Model Data Panel

5.3.1 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam mengestimasi model data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Masing-masing model memiliki karakteristik yang berbeda dalam menangkap variasi data lintas waktu dan individu (dalam hal ini provinsi).

Untuk menentukan model estimasi yang paling tepat, diperlukan serangkaian uji pemilihan model. Menurut Prawoto (2018), proses pemilihan model diawali dengan pengujian antara model Common Effect dan Fixed Effect menggunakan Uji Chow (Chow Test). Apabila hasil uji menunjukkan bahwa Fixed Effect lebih tepat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan Uji Hausman (Hausman Test) untuk memilih antara model Fixed Effect dan Random Effect. Sementara itu, Uji Lagrange Multiplier (LM Test) digunakan untuk membandingkan model Common Effect dengan Random Effect.

1. Pulau Sumatera

a. Hasil Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara model *common effect model* dan *fixed effect model* dengan hipotesis berupa:

H_0 : *Common Effect Model / Pooled OLS* ($>0,05$)

H_1 : *Fixed Effect Model* ($<0,05$)

Dalam melakukann pengujian ini yaitu dengan melihat p-value. Apabila p-value kurang dari 5% maka model yang tepat digunakan dalam uji ini adalah *fixed effect model*. Namun apabila p-value lebih besar dari 1% maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model*.

Tabel 5.5 Hasil Uji Chow Pulau Sumatera

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	33.482792	(9,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	110.657428	9	0.0000

Sumber : Data diolah Eviews 9

Nilai probabilitas cross-effect dengan menggunakan perhitungan evIEWS 9 adalah 0.0000 yang menandakan bahwa kurang dari 0,05 yang hasilnya adalah signifikan. Maka dengan hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan dalam uji chow adalah model estimasi Fixed Effect Model atau FEM.

b. Hasil Uji Hausman

Dengan menggunakan Uji Hausman yaitu untuk memilih manakah model yang paling tepat digunakan anatara fixed model dengan random effect dengan menggunakan hipotesis berupa:

H_0 = Random Effect Model ($> 0,05$)

H_1 = Fixed Effect Model ($< 0,05$)

Untuk memilih manakah uji yang paling tepat digunakan yaitu dilihat dari p-value. Apabila p-value dengan nilai 0,05 maka uji yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect. Namun apabila p-value lebih dari 0,05 maka uji yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah random effect.

Tabel 5.6 Hasil Uji Hausman Pulau Sumatera

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.766531	4	0.0381

Sumber: Data diolah eviews 9

Nilai Probabilitas cross-section random dengan menggunakan perhitungan eviews 9 adalah sebesar 0.0381 lebih besar dari 0.05, sehingga menerima H_1 dan menolak H_0 . Maka dengan menggunakan uji hausman, model yang paling tepat digunakan adalah FEM. Hal ini menunjukkan pentingnya memperlihatkan hasil uji statistic dengan cermat dalam menentukan model regresi yang paling tepat untuk menghasilkan estimasi yang akurat dan konsisten dalam analisis data panel.

2. Pulau Jawa

a. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara model *common effect model* dan *fixed effect model* dengan hipotesis berupa:

H_0 : *Common Effect Model / Pooled OLS* ($>0,05$)

H_1 : *Fixed Effect Model* ($<0,05$)

Dalam melakukann pengujian ini yaitu dengan melihat p-value. Apabila p-value kurang dari 5% maka model yang tepat digunakan dalam uji ini adalah *fixed effect model*. Namun apabila p-value lebih besar dari 1% maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *common effect model*.

Tabel 5.7 Uji Chow Pulau Jawa

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	51.058539	(5,20)	0.0000
Cross-section Chi-square	78.663078	5	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 9

Nilai probabilitas cross-effect dengan menggunakan perhitungan evIEWS 9 adalah 0.0000 yang menandakan bahwa kurang dari 0,05 yang hasilnya adalah signifikan. Maka dengan hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa model yang tepat digunakan dalam uji chow adalah model estimasi Fixed Model atau FEM.

b. Uji Hausman

Dengan menggunakan Uji Hausman yaitu untuk memilih manakah model yang paling tepat digunakan antara fixed model dengan random effect dengan menggunakan hipotesis berupa:

H_0 = Random Effect Model ($> 0,05$)

H_1 = Fixed Effect Model ($< 0,05$)

Untuk memilih manakah uji yang paling tepat digunakan yaitu dilihat dari p-value. Apabila p-value dengan nilai 0,05 maka uji yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect. Namun apabila p-value lebih dari 0,05 maka uji yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah random effect.

Tabel 5.8 Hasil Uji Hausman Pulau Jawa

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.076952	4	0.0059

Sumber: Data diolah EViews 9

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi EViews 9, diperoleh nilai probabilitas pada uji **cross-section random** sebesar **0,0059**, yang nilainya lebih kecil dari **0,05**. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , yang berarti bahwa model estimasi Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan Random Effect Model (REM).

Hasil ini menunjukkan bahwa efek individual antarsatuan cross-section (dalam hal ini provinsi) memiliki pengaruh yang signifikan dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penggunaan model Fixed Effect menjadi pilihan terbaik dalam menganalisis data panel penelitian ini, karena mampu memberikan estimasi parameter yang lebih akurat dan konsisten.

5.3.2 Uji Asumsi Klasik

Dari hasil uji pemilihan model sebelumnya maka Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinearitas

Salah satu cara untuk mengetahui multikolinearitas dalam suatu model adalah dengan melihat koefisien korelasi hasil pengujian. Jika terdapat koefisien korelasi yang lebih besar dari 0.80 maka terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 5.9 Hasil Uji Multikolinearitas Pulau Sumatera

Variabel	Centered VIF	Keterangan
Infrastruktur	1.028128	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengeluaran Pemerintah	1.010168	
Kebijakan Ekonomi	1.004917	
Investasi	1.017891	
Tingkat Kemiskinan	1.025265	

Sumber : Data Diolah Eviews9

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa seluruh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari penelitian ini kurang dari 10 yaitu pada variabel Infrastruktur sebesar 1.028128, variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar 1.010168, variabel Kebijakan Pemerintah sebesar 1.004917, variabel Investasi sebesar 1.017891 dan variabel Tingkat Kemiskinan sebesar 1.025265. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 5.10 Hasil Uji Multikolinearitas Pulau Jawa

Variabel	Centered VIF	Keterangan
Infrastruktur	1.010653	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengeluaran Pemerintah	1.163835	
Kebijakan Ekonomi	1.017236	
Investasi	1.187745	
Tingkat Kemiskinan	1.010787	

Sumber : Data Diolah Eviews9

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa seluruh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari penelitian ini kurang dari 10 yaitu pada variabel Infrastruktur sebesar 1.010653, variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar 1.163835, variabel Kebijakan Pemerintah sebesar 1.017236, variabel Investasi sebesar 1.187745 dan variabel Tingkat Kemiskinan sebesar 1.010787. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas dengan uji White ini, apabila nilai signifikansi dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik ($p > 0.05$), maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi ketika variance tidak mempunyai varian yang konstan karena data yang dibutuhkan terlalu besar atau terlalu kecil.

Tabel 5.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Pulau Sumatera

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	6.222351	Prob. F(14,35)	0.1902
Obs*R-squared	35.66900	Prob. Chi-Square(14)	0.1902
Scaled explained SS	36.12508	Prob. Chi-Square(14)	0.0930

Sumber: Data diolah eviews 9

Berdasarkan Tabel 5.11 tersebut, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai Prob. uji heteroskedastisitas white > 0.05 , maka dapat dikatakan Pulau Sumatera tidak mengalami heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas.

Tabel 5.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Pulau Jawa

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	3.165576	Prob. F(14,15)	0.0170
Obs*R-squared	22.41378	Prob. Chi-Square(14)	0.0705
Scaled explained SS	8.823742	Prob. Chi-Square(14)	0.8422

Sumber: Data diolah eviews 9

Berdasarkan Tabel 5.12 tersebut, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai Prob. uji heteroskedastisitas white (0.07) > 0.05 , maka dapat dikatakan Pulau Jawa tidak mengalami heteroskedastisitas.

5.3.3 Uji Statistik

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel infrastruktur, pengeluaran pemerintah, investasi dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di pulau sumatera dan pulau jawa.

Tabel 5.13 Hasil Uji F di Pulau Sumatera

R-squared	0.912758	Mean dependent var	0.317200
Adjusted R-squared	0.881255	S.D. dependent var	0.023993
S.E. of regression	0.008268	Akaike info criterion	-6.521370
Sum squared resid	0.002461	Schwarz criterion	-5.986003
Log likelihood	177.0342	Hannan-Quinn criter.	-6.317499
F-statistic	28.97287	Durbin-Watson stat	1.406548
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah evIEWS 9

Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar $28.97287 > F_{tabel}$ yaitu 2.578739 dan nilai signifikansi F sebesar $0.000000 < 0.05$, yang artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yaitu Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tingkat Kemiskinan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.

Tabel 5.14 Hasil Uji F di Pulau Jawa

R-squared	0.955652	Mean dependent var	0.389000
Adjusted R-squared	0.935695	S.D. dependent var	0.031332
S.E. of regression	0.007945	Akaike info criterion	-6.571243
Sum squared resid	0.001263	Schwarz criterion	-6.104177
Log likelihood	108.5686	Hannan-Quinn criter.	-6.421824
F-statistic	47.88636	Durbin-Watson stat	1.712332
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah evIEWS 9

Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar $47.88636 > F_{tabel}$ yaitu 2.578739 dan nilai signifikansi F sebesar $0.000000 < 0.05$, yang artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yaitu Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Tingkat Kemiskinan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.

2. Uji t-statistik (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Hasil uji t dapat ditunjukkan pada model Fixed Effect. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengaruh Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tahun 2019-2023 dengan menggunakan taraf keyakinan 5 persen ($\alpha = 0,05$).

Tabel 5.15 Hasil Uji T di Pulau Sumatera

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008243	0.021223	14.52428	0.0000
Infrastruktur	-0.000247	0.000943	-0.262229	0.7944
Pengeluaran Pemerintah	0.000109	0.000869	0.125728	0.9005
Kebijakan Pemerintah	-0.029596	0.021017	-1.408231	0.0661
Investasi	0.000568	0.000176	3.235101	0.0023
Tingkat Kemiskinan	0.003050	0.000905	3.368978	0.0016

Sumber: Data diolah eviews 9

Pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen secara parsial adalah sebagai berikut:

- Hasil uji t pada variabel Infrastruktur diperoleh nilai t hitung sebesar $-0.262229 < t_{tabel} 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.7944 > 0.05$, artinya variabel Infrastruktur memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.

- b. Hasil uji t pada variabel Pengeluaran Pemerintah diperoleh nilai t hitung sebesar $0.125728 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.9005 > 0.05$, artinya variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.
- c. Hasil uji t pada Hasil uji t pada variabel Kebijakan Pemerintah diperoleh nilai t hitung sebesar $-1.408231 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.0661 < 0.10$, artinya variabel Kebijakan Pemerintah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.
- d. Hasil uji t pada variabel Investasi diperoleh nilai t hitung sebesar $3.235101 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.0023 < 0.05$, artinya variabel Investasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.
- e. Hasil uji t pada variabel Tingkat Kemiskinan diperoleh nilai t hitung sebesar $3.368978 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.0016 < 0.05$, artinya variabel Tingkat Kemiskinan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera.

Tabel 5.16 Hasil Uji T di Pulau Jawa

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008393	0.091254	2.283657	0.0341
Infrastruktur	0.014774	0.005350	2.761672	0.0124
Pengeluaran Pemerintah	-0.002057	0.000747	-2.754282	0.0126
Kebijakan Pemerintah	0.017015	0.008735	1.947967	0.0663
Investasi	0.000267	7.145705	3.742732	0.0014
Tingkat Kemiskinan	-0.001480	0.002897	-0.510704	0.6154

Sumber: Data diolah reviews 9

Pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Hasil uji t pada variabel Infrastruktur diperoleh nilai t hitung sebesar $2.761672 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.0124 < 0.05$, artinya variabel Infrastruktur memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.

- b. Hasil uji t pada variabel Pengeluaran Pemerintah diperoleh nilai t hitung sebesar $-2.754282 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.0126 < 0.05$, artinya variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.
- c. Hasil uji t pada variabel Kebijakan Pemerintah diperoleh nilai t hitung sebesar $1.947967 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.0663 < 0.10$, artinya variabel Kebijakan Pemerintah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.
- d. Hasil uji t pada variabel Investasi diperoleh nilai t hitung sebesar $3.742732 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.0014 < 0.05$, artinya variabel Investasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.
- e. Hasil uji t pada variabel Tingkat Kemiskinan diperoleh nilai t hitung sebesar $-0.510704 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar $0.6154 > 0.05$, artinya variabel Tingkat Kemiskinan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa.

3. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan sebuah alat untuk mengukur estimasi data berupa angka yang menunjukkan seberapa dekat garis yang diestimasi dari data tersebut dengan data sesungguhnya (Marzuki, 2019). Perhitungan baik atau tidaknya nilai dilihat dari rentan angka 0-1. Jika angka diatas 0,5 maka dapat dikatakan baik.

Tabel 5.17 Hasil Koefisien Determinan (R^2) di Pulau Sumatera

R-squared	0.912758	Mean dependent var	0.317200
Adjusted R-squared	0.881255	S.D. dependent var	0.023993
S.E. of regression	0.008268	Akaike info criterion	-6.521370
Sum squared resid	0.002461	Schwarz criterion	-5.986003
Log likelihood	177.0342	Hannan-Quinn criter.	-6.317499
F-statistic	28.97287	Durbin-Watson stat	1.406548
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah Eviews

Berdasarkan Tabel 5.17, besar Koefisien Determinan (R^2) sebesar 0.912758. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 91.27% yang berarti bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 91.27% terhadap variabel dependen. Sisanya 8.73% dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut.

Tabel 5.18 Hasil Koefisien Determinan (R^2) di Pulau Jawa

R-squared	0.955652	Mean dependent var	0.389000
Adjusted R-squared	0.935695	S.D. dependent var	0.031332
S.E. of regression	0.007945	Akaike info criterion	-6.571243
Sum squared resid	0.001263	Schwarz criterion	-6.104177
Log likelihood	108.5686	Hannan-Quinn criter.	-6.421824
F-statistic	47.88636	Durbin-Watson stat	1.712332
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah Eviews

Berdasarkan Tabel 5.18, besar Koefisien Determinan (R^2) sebesar 0.955652. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 95.56% yang berarti bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 95.56% terhadap variabel dependen. Sisanya 4.44% dipengaruhi faktor lain diluar model regresi tersebut.

5.3.4 Hasil Pengujian Regresi Panel

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kesesuaian model estimasi yang dilakukan melalui serangkaian uji statistik, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM), diperoleh hasil yang mengarah pada pemilihan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Ketiga uji tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa model estimasi sesuai dan mampu menggambarkan karakteristik data panel secara optimal adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 5.19 Hasil Estimasi Model Fixed Effect di Pulau Sumatera

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008243	0.021223	14.52428	0.0000
Infrastruktur	-0.000247	0.000943	-0.262229	0.7944
Pengeluaran Pemerintah	0.000109	0.000869	0.125728	0.9005
Kebijakan Pemerintah	-0.029596	0.021017	-1.408231	0.0661
Investasi	0.000568	0.000176	3.235101	0.0023
Tingkat Kemiskinan	0.003050	0.000905	3.368978	0.0016
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.912758	Mean dependent var		0.317200
Adjusted R-squared	0.881255	S.D. dependent var		0.023993
S.E. of regression	0.008268	Akaike info criterion		-6.521370
Sum squared resid	0.002461	Schwarz criterion		-5.986003
Log likelihood	177.0342	Hannan-Quinn criter.		-6.317499
F-statistic	28.97287	Durbin-Watson stat		1.406548
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah eviews 9

Berdasarkan Tabel 5.19 hasil regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut :

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{1it} + \beta_2 BP_{2it} + \beta_3 KP_{3it} + \beta_4 INV_{4it} + \beta_5 TM_{5it} + \varepsilon$$

GR =

$$0.008243 - 0.000247INF + 0.000109BP - 0.029596KP + 0.000568INV + 0.003050TM + \varepsilon$$

Berikut adalah penjelasan hasil estimasi dari persamaan regresi, berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0.008243 dengan tanda positif, artinya jika konstanta pada Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tingkat Kemiskinan sama dengan nol tidak berubah maka Ketimpangan Pendapatan meningkat sebesar 0.008243% pada Pulau Sumatera.

2. Nilai koefisien Kebijakan Pemerintah sebesar -0.029596 dengan tanda negatif, hal ini diartikan jika Kebijakan Pemerintah sebesar -0.029596 satu juta maka Ketimpangan Pendapatan menurun 0.029596 pada Pulau Sumatera.
3. Nilai koefisien Investasi sebesar 0.000568 dengan tanda positif, hal ini diartikan jika Investasi meningkat satu Miliar maka Ketimpangan Pendapatan meningkat sebesar 0.000568 persen pada Pulau Sumatera.
4. Nilai koefisien Tingkat Kemiskinan sebesar 0.003050 dengan tanda positif, hal ini diartikan jika Tingkat Kemiskinan meningkat satu persen maka Ketimpangan Pendapatan meningkat sebesar 0.003050 persen pada Pulau Sumatera.

Tabel 5.20 Hasil Estimasi Model Fixed Effect di Pulau Jawa

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.008393	0.091254	2.283657	0.0341
Infrastruktur	0.014774	0.005350	2.761672	0.0124
Pengeluaran Pemerintah	-0.002057	0.000747	-2.754282	0.0126
Kebijakan Pemerintah	0.017015	0.008735	1.947967	0.0663
Investasi	0.000267	7.145705	3.742732	0.0014
Tingkat Kemiskinan	-0.001480	0.002897	-0.510704	0.6154
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.955652	Mean dependent var		0.389000
Adjusted R-squared	0.935695	S.D. dependent var		0.031332
S.E. of regression	0.007945	Akaike info criterion		-6.571243
Sum squared resid	0.001263	Schwarz criterion		-6.104177
Log likelihood	108.5686	Hannan-Quinn criter.		-6.421824
F-statistic	47.88636	Durbin-Watson stat		1.712332
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah eviews 9

Berdasarkan Tabel 5.20 hasil regresi data panel dengan persamaan sebagai berikut :

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{1it} + \beta_2 BP_{2it} + \beta_3 KP_{3it} + \beta_4 INV_{4it} + \beta_5 TM_{5it} + \varepsilon$$

GR =

$$0.008393 + 0.014774INF - 0.002057BP + 0.0017015KP + 0.000267INV - 0.001480TM + \varepsilon$$

Berikut adalah penjelasan hasil estimasi dari persamaan regresi, berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 0.008393, artinya jika konstanta pada Variabel Infrastruktur, Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Tingkat Kemiskinan sama dengan nol tidak berubah maka Ketimpangan Pendapatan meningkat sebesar 0.008393% pada Pulau Jawa.
2. Nilai koefisien Variabel Infrastruktur sebesar 0.014774 dengan tanda positif, hal ini diartikan jika Infrastruktur meningkat seribu KM maka Ketimpangan Pendapatan meningkat sebesar 0.014774 persen pada Pulau Jawa.
3. Nilai koefisien Variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar -0.002057 dengan tanda negatif, hal ini diartikan jika Variabel Pengeluaran Pemerintah meningkat satu Miliar maka Ketimpangan Pendapatan menurun sebesar 0.002057 persen pada Pulau Jawa.
4. Nilai koefisien Variabel Kebijakan Pemerintah sebesar 0.017015 dengan tanda positif, hal ini diartikan jika Variabel Kebijakan Pemerintah meningkat satu juta maka Ketimpangan Pendapatan meningkat sebesar 0.017015 persen pada Pulau Jawa.
5. Nilai koefisien Variabel Investasi sebesar 0.000267 dengan tanda positif, hal ini diartikan jika Variabel Investasi meningkat satu Miliar maka Ketimpangan Pendapatan meningkat sebesar 0.000267 persen pada Pulau Jawa.

5.4 Analisis Ekonomi

5.4.1 Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $-0.262229 < t$ tabel 2.014103 dan nilai Prob. sebesar 0.7944 , ini menunjukkan bahwa Infrastruktur memiliki hubungan yang negative dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa mempunyai t hitung sebesar $0.14774 < t$ tabel 2.014103 dan nilai Prob. sebesar 2.761672 , ini menunjukkan bahwa Infrastruktur memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Pada Pulau Sumatera, arah negatif ini secara teoritis mencerminkan bahwa peningkatan infrastruktur seharusnya dapat menurunkan ketimpangan pendapatan, karena infrastruktur meningkatkan mobilitas, memperluas akses ke pasar dan layanan, serta membuka peluang ekonomi di wilayah terpencil. Namun, karena hasilnya tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa panjang jalan saja belum cukup menjadi faktor penentu penurunan ketimpangan.

Selain itu, penelitian oleh Nasution (2021) juga menemukan bahwa infrastruktur baru memberikan efek terhadap ketimpangan apabila didukung oleh intervensi lain, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang dibangun tanpa disertai pemerataan layanan dan kapasitas ekonomi lokal seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu, terutama pelaku ekonomi besar di wilayah perkotaan.

Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan regional yang menekankan bahwa kuantitas infrastruktur harus disertai dengan kualitas dan pemerataan penggunaannya. Panjang jalan provinsi belum tentu menggambarkan fungsi jalan, kondisi jalan, atau konektivitas antarwilayah miskin dan kaya. Jika jalan hanya dibangun di wilayah yang sudah maju, maka ketimpangan justru bisa tetap tinggi.

Penelitian oleh Kuncoro (2013) dan Aritonang (2020) juga menunjukkan bahwa infrastruktur hanya efektif menurunkan ketimpangan bila diikuti dengan pembangunan sektor produktif lokal, transportasi pendukung, serta penguatan UMKM. Di Pulau Sumatera, banyak wilayah terpencil yang masih belum tersentuh

konektivitas antar-kabupaten secara optimal, sehingga pembangunan jalan belum berdampak luas pada kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera harus difokuskan tidak hanya pada peningkatan panjang jalan, tetapi juga pada peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan konektivitas antarwilayah tertinggal, agar manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih merata dan efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan.

Panjang jalan provinsi di Pulau Sumatera berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Infrastruktur jalan yang lebih baik biasanya akan meningkatkan akses ke peluang ekonomi dan sosial, yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan memperbaiki Gini Ratio. Sebaliknya, daerah dengan infrastruktur jalan yang kurang berkembang bisa mengalami ketimpangan yang lebih besar, yang tercermin dalam Gini Ratio yang lebih tinggi.

Contohnya Aceh memiliki panjang jalan (22.000 KM) yang cukup baik, ketimpangan pendapatan mungkin masih ada, terutama setelah konflik lama yang mempengaruhi distribusi pembangunan. Gini Ratio bisa lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih terhubung. Sedangkan, Bengkulu (5.000 KM) dan Kepulauan Riau (4.000KM) dilihat panjang jalan yang lebih terbatas, provinsi-provinsi ini bisa memiliki Gini Ratio yang lebih tinggi, mengingat ketimpangan akses ekonomi dan sumber daya sangat terbatas.

Hasil penelitian di Pulau Jawa tidak sesuai dengan teori ataupun harapan yang menghendaki peningkatan infrastruktur dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori pusat-pinggiran (*core-periphery theory*) yang dikemukakan oleh John Friedmann. Menurut teori ini, pembangunan ekonomi cenderung terpusat di daerah-daerah tertentu (pusat) yang memiliki keunggulan komparatif, seperti infrastruktur yang memadai, sementara daerah-daerah lain (pinggiran) menjadi tertinggal.

Hal ini juga dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, pembangunan infrastruktur seringkali terpusat di daerah-daerah tertentu, seperti pusat perkotaan atau Kawasan industri. Hal ini mengakibatkan daerah-daerah tersebut menjadi lebih maju dan menarik investasi, sementara daerah lain yang kurang mendapat perhatian infrastruktur menjadi tertinggal. Kondisi ini dapat

memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat di daerah yang memiliki infrastruktur memadai dengan yang tidak. Kedua, pembangunan infrastruktur yang tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat menyebabkan sebagian kelompok masyarakat tidak dapat memanfaatkan infrastruktur tersebut secara optimal.

Hasil penelitian di Pulau Jawa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Ananda pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertentu saja, sehingga memperlebar kesenjangan dengan daerah lain yang kurang mendapat perhatian infrastruktur.

Pada Provinsi Jawa Barat memiliki jalan yang cukup luas (30.000 km) dan merupakan salah satu provinsi dengan ekonomi terbesar di Jawa. Wilayah ini, terutama kawasan metropolitan seperti Bandung, memiliki tingkat perekonomian yang relatif lebih tinggi dan pendapatan yang lebih merata, meskipun masih ada ketimpangan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Jawa Timur memiliki panjang jalan yang lebih besar (35.000 km), dan provinsi ini memiliki salah satu sektor ekonomi terbesar, seperti pertanian dan industri. Infrastruktur jalan yang baik membantu mendistribusikan hasil produksi ke pasar yang lebih luas, meskipun ketimpangan pendapatan bisa terlihat di daerah-daerah dengan akses jalan yang kurang optimal.

5.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $0.125728 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar 0.9005 , ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa mempunyai t hitung sebesar $-0.002057 < t \text{ tabel } 2.014103$ dan nilai Prob. sebesar 0.0126 , ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Dalam penelitian ini di Pulau Sumatera, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin besar pengeluaran pemerintah maka ketimpangan pendapatan juga semakin tinggi. Hal ini berarti pengeluaran pemerintah belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Pengeluaran yang tergolong belanja publik yang semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini mengalami peningkatan. Ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya terjangkau atau dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung.

Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah belum mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori Kuznets juga mendukung kondisi ini, di mana pada tahap awal pembangunan, pengeluaran negara cenderung tidak cukup untuk menurunkan kesenjangan tanpa disertai distribusi yang adil. Dengan demikian, meskipun terdapat peningkatan dalam pengeluaran pemerintah, dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan tetap lemah dan tidak signifikan.

Hal ini dikarenakan, pembagian alokasi anggaran belanja pemerintah yang difokuskan kepada beberapa sektor yaitu, fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketertiban, lingkungan hidup, pariwisata, pelayanan umum, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum, serta fungsi lainnya yang alokasi terbesar disalurkan ke fungsi pelayanan umum. Sehingga dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah belum cukup menanggulangi, namun fungsi alokasinya dalam pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah dapat dikatakan baik dan proyek-proyek yang dilaksanakan efektif.

Provinsi-provinsi yang lebih maju secara ekonomi, seperti pada tahun 2022, Provinsi Riau sebesar 9,2 triliun dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 12,5 triliun, biasanya lebih banyak mendapatkan alokasi pengeluaran untuk infrastruktur dan pembangunan sektor ekonomi, meskipun ketimpangan pendapatan tetap ada antara daerah perkotaan dan pedesaan. Provinsi yang memiliki kota besar dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi cenderung mendapat anggaran lebih banyak.

Hasil penelitian di Pulau Jawa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan pengeluaran pemerintah cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut.

Hasil ini mendukung pandangan dalam teori Keynesian, yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menstabilkan ekonomi dan memperbaiki distribusi pendapatan melalui intervensi fiskal. Dalam konteks Pulau Jawa yang memiliki konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi pengeluaran pemerintah tampaknya lebih mampu menjangkau kelompok rentan dan memperkuat pemerataan akses terhadap layanan publik. Hal ini mencerminkan bahwa alokasi belanja publik di Pulau Jawa lebih efektif dalam menyentuh kelompok masyarakat rentan dan memberikan dampak redistributif yang lebih kuat.

Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, lebih dari 150 juta jiwa, yang hampir setengah dari total populasi Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih banyak, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, memerlukan anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lainnya.

Pada Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk yang besar dan beragam, serta pusat kegiatan ekonomi dan politik Indonesia. Ini menjelaskan mengapa pengeluaran pemerintah di Jakarta sangat tinggi, mencapai lebih dari Rp 55 triliun. pusat ekonomi Indonesia, yang menampung kantor pusat perusahaan, industri kreatif, sektor jasa, serta pusat keuangan. Karena itu, pengeluaran pemerintah di Jakarta digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi ini, seperti transportasi massal (misalnya MRT, TransJakarta), pengembangan infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya

Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang terarah dan efektif dapat menjadi instrumen penting dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Implikasi kebijakannya adalah pentingnya menjaga keberlanjutan dan ketepatan sasaran dalam belanja negara, khususnya di sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat berpendapatan rendah.

Hasil penelitian di Pulau Jawa sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Wibowo (2020) yang menemukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah yang diarahkan ke sektor-sektor produktif mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin dan menurunkan rasio Gini di beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh studi Shavana (2022) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial dapat menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan secara signifikan.

Sebaliknya, ketidaksignifikanan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan di Pulau Sumatera konsisten dengan penelitian Siregar (2018), yang menyatakan bahwa efektivitas belanja pemerintah dalam mengurangi ketimpangan sangat bergantung pada aspek kelembagaan dan efektivitas tata kelola. Dalam konteks Sumatera, distribusi pengeluaran yang tidak merata serta lemahnya pengawasan sering kali menyebabkan belanja publik tidak memberikan dampak yang optimal terhadap pemerataan pendapatan.

5.4.3 Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $-1.408231 < t$ tabel 2.014103 dan nilai Prob. sebesar 0.0661 , ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan 10% terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa mempunyai t hitung sebesar $1.947967 < t$ tabel 2.014103 dan nilai Prob. sebesar 0.0663 , ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah memiliki hubungan yang positif dan signifikan 10% terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Hasil penelitian di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik pada taraf 10% terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Artinya, semakin intensif dan tepat sasaran kebijakan pemerintah yang diterapkan, maka ketimpangan pendapatan cenderung menurun.

Hubungan negatif yang signifikan ini menunjukkan peran strategis pemerintah dalam mengatur distribusi sumber daya melalui kebijakan ekonomi, fiskal, dan sosial. Kebijakan seperti penetapan upah minimum (UMP). Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan teori distribusi dari Richard Musgrave yang menyatakan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah dalam ekonomi adalah fungsi distribusi yaitu menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal dan intervensi sosial. Dalam konteks Pulau Sumatera, kebijakan pemerintah yang diarahkan pada sektor inklusif seperti pengurangan ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja—dapat menekan disparitas ekonomi antar wilayah maupun antarkelompok masyarakat.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Harahap dan Pratama (2020) yang menemukan bahwa kebijakan pemerintah di bidang sosial-ekonomi berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan, terutama ketika disertai dengan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat. Selain itu, Yuliana (2018) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik dalam menekan ketimpangan sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran, transparansi pelaksanaan, serta konsistensi jangka panjang.

Oleh karena itu, hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun masih dalam tingkat signifikansi 10%, kebijakan pemerintah di Pulau Sumatera mulai menunjukkan peran positif dalam menekan ketimpangan. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitasnya, dibutuhkan reformasi kebijakan yang lebih menyeluruh, peningkatan tata kelola, dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan.

Hasil penelitian di Pulau Jawa dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas atau skala kebijakan pemerintah, ketimpangan pendapatan justru cenderung meningkat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks Pulau Jawa, kebijakan pemerintah yang ada mungkin belum tepat sasaran atau bahkan memberikan dampak yang lebih besar kepada kelompok berpenghasilan menengah-atas,

sehingga memperbesar kesenjangan. Hal ini sejalan dengan kritik terhadap kebijakan populis atau makro yang tidak mempertimbangkan struktur sosial-ekonomi lokal.

Secara teoritis, hasil ini dapat dijelaskan melalui Teori Kuznets, di mana pada tahap awal dan menengah dari pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena pertumbuhan yang tidak merata. Hal ini terutama terjadi ketika pemerintah lebih banyak mendorong pertumbuhan melalui sektor formal dan urban, yang lebih cepat berkembang dibandingkan wilayah dan sektor informal, sehingga menciptakan jurang pendapatan yang semakin lebar.

Dengan demikian, meskipun kebijakan pemerintah di Pulau Jawa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan, arah hubungannya yang positif menandakan bahwa intervensi tersebut belum sepenuhnya menjangkau atau berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah, dan perlu adanya evaluasi terhadap arah, pelaksanaan, dan sasaran kebijakan publik yang lebih inklusif.

Penelitian sebelumnya oleh Fitrani dan Rasyid (2017) serta Handayani (2020) mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa di wilayah dengan konsentrasi kekuatan ekonomi seperti Pulau Jawa, program pemerintah sering kali diserap lebih cepat oleh kelompok mapan, dan bukannya memperkecil jurang kesejahteraan, malah berisiko memperlebar ketimpangan jika tidak didesain dengan prinsip keadilan sosial.

5.4.4 Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $3.235101 > t$ tabel 2.014103 dan nilai Prob. sebesar 0.0023 , ini menunjukkan bahwa Investasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa mempunyai t hitung sebesar $3.742732 > t$ tabel 2.014103 dan nilai Prob. sebesar 0.0014 , ini menunjukkan bahwa Investasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Hasil penelitian di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ini berarti bahwa investasi meningkat maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat. Di daerah yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi. Di daerah lainnya dimana perkembangan sangat lambat maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Dengan perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi di daerah yang mapan mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan.

Peningkatan investasi di Pulau Jawa cenderung menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat terjadi apabila investasi terkonsentrasi pada sektor tertentu yang tidak menyerap tenaga kerja secara luas atau hanya menguntungkan kelompok ekonomi atas. Contohnya adalah investasi di sektor properti, teknologi, atau infrastruktur perkotaan yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpenghasilan tinggi.

Temuan ini konsisten dengan teori Kuznets, yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh investasi, ketimpangan pendapatan biasanya meningkat terlebih dahulu sebelum akhirnya menurun dalam jangka panjang. Namun, jika pemerataan akses terhadap hasil investasi tidak terjadi, ketimpangan dapat tetap tinggi atau bahkan terus meningkat.

Seperti pada Provinsi Riau sebesar 25.3 triliun (yang memiliki total investasi terbesar di Sumatera) banyak menerima investasi di sektor energi dan sumber daya alam (misalnya, minyak dan gas). Ini bisa menciptakan ketimpangan antara kota besar yang mendapatkan manfaat langsung dari investasi (seperti Pekanbaru) dan daerah pedesaan yang tidak memperoleh akses yang setara terhadap lapangan pekerjaan atau peluang ekonomi.

Seperti pada Provinsi Jakarta adalah pusat bagi banyak perusahaan teknologi, jasa keuangan, dan perusahaan multinasional dengan total investasi sebesar 143 triliun. Ini cenderung memperburuk ketimpangan pendapatan, karena

hanya segmen-segmen tertentu dari masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam sektor ini (misalnya, pekerja terampil di bidang teknologi dan keuangan).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2024) yang menyatakan bahwa pertumbuhan investasi meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi dan pertumbuhan investasi mempunyai pengaruh nyata atau pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

5.4.5 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $3.368978 > t$ tabel 2.014103 dan nilai Prob. sebesar 0.0016 , ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Sedangkan Pulau Jawa mempunyai t hitung sebesar $-0.510704 < t$ tabel 2.014103 dan nilai Prob. sebesar 0.6154 , ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan memiliki hubungan yang negative dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

Hasil penelitian di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera, dengan arah hubungan positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka ketimpangan pendapatan juga cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin tidak hanya berpenghasilan rendah, tetapi juga tertinggal jauh dibanding kelompok berpenghasilan tinggi, sehingga memperlebar jarak pendapatan antar kelompok.

Seperti pada Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan yang miskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 11.78 persen, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau tambang dengan pendapatan rendah. Sementara itu, kota besar seperti Palembang memiliki perkembangan ekonomi yang pesat dan lebih banyak peluang bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi, memperburuk ketimpangan pendapatan.

Temuan ini sejalan dengan teori dualisme ekonomi (Boeke dan Lewis), yang menjelaskan bahwa keberadaan sektor tradisional (masyarakat miskin) yang tidak terintegrasi dengan sektor modern (ekonomi formal) menciptakan kesenjangan pendapatan yang besar. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi penyumbang utama ketimpangan, karena distribusi hasil pembangunan tidak merata.

Penelitian Suryahadi dan Sumarto (2021) mendukung hasil ini, di mana mereka menemukan bahwa di wilayah luar Jawa, peningkatan angka kemiskinan sangat erat kaitannya dengan meningkatnya ketimpangan, karena tidak tersedianya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan di Pulau Sumatera tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga esensial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Intervensi seperti bantuan sosial bersyarat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pemerataan layanan publik menjadi kunci dalam menekan kesenjangan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa pada tahun 2019-2023. Pendapatan tidak mempengaruhi kemiskinan hal ini dikarenakan ketika tingkat rata-rata seluruh wilayah masyarakat di suatu wilayah berada dibawah garis kemiskinan maka hal ini tidak dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan, karena distribusi pendapatan tidak merata jika dibandingkan dengan kemiskinan itu sendiri sehingga dapat dikatakan keadaan masyarakat yang masih hidup dibawah rata-rata. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hindun et al., 2019) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Tidak berpengaruhnya kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain diantaranya pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan pembangunan antara wilayah, dan banyaknya investasi pada proyek padat modal, kebijakan industri impor.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan Teori Kuznets, yang menyatakan bahwa dalam fase tertentu, baik kemiskinan maupun ketimpangan bisa menunjukkan tren menurun atau naik secara tidak linier tergantung pada tahapan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Di Pulau Jawa, sebagai wilayah yang relatif lebih maju dibandingkan kawasan lain, sebagian besar penduduk mungkin telah keluar dari kategori sangat miskin, sehingga variabel kemiskinan menjadi kurang variatif dan tidak lagi menjadi faktor dominan dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Dengan kata lain, meskipun angka kemiskinan menurun, hal itu tidak serta merta menurunkan ketimpangan pendapatan, karena kelompok kaya mungkin tumbuh jauh lebih cepat, sehingga kesenjangan tetap tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan publik untuk tidak hanya menargetkan pengurangan kemiskinan, tetapi juga secara aktif mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan.

Seperti pada Provinsi Jakarta memiliki ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi, tetapi tingkat kemiskinan (3.60 persen) relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada sebagian penduduk yang masih miskin, ketimpangan pendapatan di Jakarta lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti akses terhadap pendidikan, teknologi, dan sektor ekonomi formal. Kemiskinan tidak terlalu mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara keseluruhan di Jakarta karena banyaknya sektor yang memberikan kesempatan kerja dengan pendapatan tinggi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus dan Nugroho (2020) mengungkapkan bahwa wilayah-wilayah dengan tingkat daya saing dan potensi ekonomi yang tinggi, seperti Pulau Jawa, cenderung menjadi magnet bagi aliran investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, kecenderungan tersebut sering kali disertai dengan konsentrasi investasi yang terpusat di kawasan perkotaan dan wilayah-wilayah yang telah mengalami industrialisasi berbasis padat modal. Fenomena ini menciptakan ketimpangan spasial yang signifikan, di mana daerah pedesaan atau kawasan dengan infrastruktur terbatas menjadi relatif terabaikan dalam alokasi investasi.

5.5 Implikasi Kebijakan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel infrastruktur, pengeluaran pemerintah, kebijakan pemerintah, investasi, dan kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, maka implikasi kebijakan penelitian yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

5.5.1 Implikasi Kebijakan Variabel Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Pada Pulau Sumatera, variabel infrastruktur menunjukkan hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan belum memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi atas efektivitas program infrastruktur yang berjalan, khususnya terkait keterpaduan pembangunan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan daerah tertinggal.

Penelitian oleh Nasution (2021) menemukan bahwa infrastruktur baru memberikan efek terhadap ketimpangan apabila didukung oleh intervensi lain, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur yang dibangun tanpa disertai pemerataan layanan dan kapasitas ekonomi lokal seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu, terutama pelaku ekonomi besar di wilayah perkotaan. Meskipun pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera telah dilakukan, dampaknya terhadap penurunan ketimpangan pendapatan masih belum signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan infrastruktur yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan terintegrasi dengan program ekonomi lokal, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah.

Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan akses ekonomi, seperti Akses transportasi bagi wilayah terpencil, meningkatkan investasi

infrastruktur di daerah tertinggal di Sumatera agar potensi ekonomi lokal bisa berkembang secara merata, terutama melalui pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan logistik.

Di sisi lain, di Pulau Jawa, infrastruktur justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengindikasikan bahwa infrastruktur cenderung terkonsentrasi di wilayah maju dan berkontribusi pada perluasan disparitas pendapatan. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah melakukan redistribusi pembangunan infrastruktur ke wilayah pinggiran dan pedesaan, serta memperkuat konektivitas antar wilayah dengan pendekatan berbasis pemerataan akses dan potensi ekonomi lokal.

Penelitian Firdaus dan Nugroho (2020) menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa di Pulau Jawa, pembangunan infrastruktur mendorong pertumbuhan wilayah metropolitan dan kawasan industri padat modal. Namun hal ini menyebabkan ketimpangan horizontal, karena daerah rural dan masyarakat berpenghasilan rendah tidak ikut terdorong secara ekonomi.

Implikasi ini sejalan dengan RPJMN 2020–2024, yang menargetkan Pemerataan pembangunan antardaerah, Pengurangan ketimpangan, Penguatan konektivitas wilayah timur dan barat Indonesia, dan Pemberdayaan desa dan masyarakat miskin

5.5.2 Implikasi Kebijakan Variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Selanjutnya, variabel pengeluaran pemerintah menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan di Sumatera, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Pulau Sumatera cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan, meskipun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Hal ini dapat terjadi karena Alokasi belanja pemerintah belum sepenuhnya menyasar kelompok rentan atau wilayah tertinggal, Belanja cenderung bersifat administratif atau konsumtif (misalnya gaji pegawai), bukan produktif, serta Kurangnya integrasi antara belanja modal dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2019) dan Bappenas (2021) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di banyak daerah, termasuk Sumatera, masih terfokus pada belanja pegawai dan operasional, sehingga kurang berdampak dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pemerintah pusat juga telah menekankan pentingnya *quality spending* melalui kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berbasis kinerja.

Implikasi kebijakan yang disarankan yaitu, Reorientasi Pengeluaran Pemerintah ke Sektor yang Pro-Poor Pengeluaran pemerintah perlu lebih difokuskan pada belanja yang berdampak langsung terhadap masyarakat miskin, seperti Pendidikan dan kesehatan dasar, Program padat karya, serta Pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa. Kebijakan ini sejalan dengan RPJMN 2020–2024 yang mendorong pengurangan kemiskinan melalui pembangunan SDM dan ekonomi inklusif.

Sedangkan di Jawa, variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tepat pada sektor sosial dan pelayanan publik dapat menurunkan ketimpangan secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi belanja pemerintah di Sumatera agar lebih berorientasi pada program-program yang bersifat pro-rakyat.

Temuan ini konsisten dengan studi oleh Suryahadi dan Sumarto (2009), yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah berupa pengeluaran sosial dan subsidi langsung terbukti mampu menurunkan ketimpangan pendapatan secara efektif, terutama di wilayah dengan infrastruktur dan akses layanan publik yang sudah memadai, seperti Pulau Jawa.

Implikasi yang disarankan yaitu, Perluasan dan Penguatan Program Belanja yang Bersifat Redistributif Karena pengeluaran pemerintah terbukti menurunkan ketimpangan, maka arah kebijakan sebaiknya Diperluas cakupannya, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi (daerah pinggiran kota besar, pedesaan di selatan Jawa), Fokus pada program bantuan sosial terarah, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta dukungan produktif bagi UMKM dan petani kecil. Kebijakan ini sejalan dengan arah RPJMN 2020–2024, yang menekankan peran anggaran negara sebagai alat pemerataan dan penurunan ketimpangan.

5.5.3 Implikasi Kebijakan Variabel Kebijakan Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Pada variabel kebijakan pemerintah, hasil menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di Pulau Sumatera efektif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Artinya, kebijakan yang telah diterapkan baik melalui intervensi fiskal, program sosial, maupun kebijakan pembangunan telah berhasil mengurangi kesenjangan antarwilayah atau antarkelompok pendapatan.

Hasil ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang disusun berdasarkan kebutuhan lokal lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Implikasi kebijakan yang disarankan yaitu, Pemerintah Harus Mempertahankan dan Memperkuat Kebijakan yang Terbukti Efektif. Kebijakan yang berdampak positif dalam mengurangi ketimpangan perlu Dipertahankan secara berkelanjutan, terutama kebijakan yang bersifat afirmatif untuk wilayah tertinggal di Sumatera, dan Ditingkatkan cakupannya melalui koordinasi lintas sektor, seperti antara kebijakan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Kebijakan yang relevan yaitu, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur dan pelayanan dasar, Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PKT), dan Pemberdayaan ekonomi desa dan daerah perbatasan.

Namun berpengaruh positif dan signifikan di Jawa. Artinya Artinya, kebijakan yang diterapkan justru memperbesar ketimpangan, karena Kebijakan terlalu berpihak pada sektor formal dan kawasan industri yang telah maju, Kurangnya pemerataan manfaat ke wilayah rural dan kelompok berpendapatan rendah, dan Kebijakan bersifat universal, bukan afirmatif terhadap kelompok atau daerah tertinggal di Jawa.

Penelitian Firdaus & Nugroho (2020) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang terlalu fokus pada kawasan industri dan perkotaan di Jawa memperbesar kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah di Pulau Jawa secara nyata justru memperbesar ketimpangan pendapatan.

5.5.4 Implikasi Kebijakan Variabel Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Investasi di kedua wilayah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi selama ini cenderung lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas atau wilayah-wilayah yang telah berkembang. Oleh karena itu, arah kebijakan investasi ke depan harus lebih berpihak pada pemerataan, dengan mendorong investasi yang bersifat inklusif, padat karya, dan berbasis potensi lokal di wilayah tertinggal. Pemberian insentif kepada investor yang menanamkan modalnya di sektor pertanian, industri kecil, serta UMKM di luar pusat-pusat ekonomi utama perlu diperluas agar dapat menekan disparitas pendapatan antar lapisan masyarakat.

Studi Yuliana & Aditya (2021) menemukan bahwa investasi di Indonesia cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa dan memperkuat ketimpangan regional karena lemahnya daya saing wilayah luar Jawa. Karena investasi di Sumatera dan Jawa secara signifikan memperbesar ketimpangan pendapatan, maka perlu kebijakan yang mengarahkan investasi ke sektor-sektor inklusif dan wilayah-wilayah tertinggal. Pemerintah harus menjamin bahwa investasi tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengurangan ketimpangan, peningkatan lapangan kerja lokal, dan penguatan ekonomi rakyat.

5.5.4 Implikasi Kebijakan Variabel Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa

Variabel tingkat kemiskinan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera, namun tidak signifikan di Jawa. Hal ini menandakan bahwa kemiskinan masih menjadi faktor dominan dalam mendorong ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan pembangunan wilayah ini. Pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan

dasar, serta memberikan dukungan terhadap penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Di Pulau Jawa, meskipun tingkat kemiskinan cenderung menurun, namun ketimpangan pendapatan tetap tinggi. Ini menandakan bahwa penurunan kemiskinan belum secara otomatis berbanding lurus dengan perbaikan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan di Jawa perlu difokuskan pada penciptaan kesetaraan peluang ekonomi, akses terhadap pendidikan berkualitas, dan redistribusi aset produktif.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan berbasis wilayah (*place-based policy*) dalam perumusan kebijakan nasional. Setiap daerah memiliki dinamika ekonomi dan sosial yang berbeda sehingga diperlukan strategi yang bersifat kontekstual dan tidak bersifat seragam (*one-size-fits-all*). Pemerintah pusat perlu mendorong sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merancang intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, upaya pengurangan ketimpangan pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.